



**JURNAL ILMIAH HUKUM
DE'JURE
KAJIAN ILMIAH HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

JIH ~ DE'JURE	Vol. 3	No. 1	Halaman 1-77	Mei 2018	ISSN: 2541-1594
---------------	--------	-------	--------------	----------	-----------------

- ⊖ **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI LELANG HAK TANGGUNGAN**
Andi Steven Liono
- ⊖ **KAJIAN HUKUM KRITIS: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM LANDASAN FILOSOFIS**
Anwar Hidayat dan Irma Garwan
- ⊖ **PERLUASAN WEWENANG PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21-PUU-XII-2014**
Deddi Diliyanto, Zainal Asikin dan Amiruddin
- ⊖ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU DALAM KEBIJAKAN NASIONAL**
Deny Guntara, Irma Garwan dan Muhammad Gary Gagarin Akbar
- ⊖ **PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH KE PERSEROAN DAERAH: PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KARAWANG**
Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Deny Guntara
- ⊖ **TINGKAT PERCERAIAN DAN PENGARUH FAKTOR EKONOMI DI KABUPATEN KARAWANG**
Irma Garwan, Abdul Kholiq dan Muhammad Gary Gagarin Akbar
- ⊖ **POLITIK HUKUM: REFORMULASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**
Mexasai Indra dan Oksep Adhayanto
- ⊖ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK BAGI PEKERJA**
Rohendra Fathammubina dan Rani Apriani
- ⊖ **PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK DAN DEMOKRASI DI INDONESIA PENGADILAN NEGERI**
Stephanus Pelor dan Ina Heliany
- ⊖ **KOMPETENSI DAN KEWENANGAN PRAKTIK KEDOKTERAN: PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA**
Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan



JURNAL ILMIAH HUKUM DE'JURE KAJIAN ILMIAH HUKUM

Susunan Redaksi (Board of Editors)

Penanggung jawab (<i>Head of Advisor</i>)	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Mitra Bestari (<i>Peer Reviewer</i>)	:	Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H Dr. Abdul Atsar, S.H., S.Pd., M.H Dr. Bambang Daru, S.H., M.H Dr. Hernadi, S.H., LL.M
Pemimpin Redaksi (<i>Editor in Chief</i>)	:	Pamungkas Satya Putra, S.H., M.H
Dewan Editor (<i>Editorial Board</i>)		
Manajer Editor (<i>Managing Editor</i>)	:	M. Holyone Nurdin Singadimedja, S.H., M.H Rahmi Zubaedah, S.H., M.H
Manajer Keuangan (<i>Manager in Finance</i>)	:	Taufik Paribo Uswatun Hassanah Imam Nurzaman M. Saeful Ridwan Ryan Pahlevi
Manajer Pemasaran (<i>Manager in Marketing</i>)	:	Maharani Nurdin, S.H., M.H Mansyur Inayah, S.Pd Irvan
Editor Bahasa Indonesia (<i>Editor in Indonesia Language</i>)	:	Slamet, S.Pd., M.Pd
Editor Bahasa Inggris (<i>Editor in English Language</i>)	:	Dini, S.Pd., M.Pd
Editor Tata Letak & Sampul (<i>Layout & Cover</i>)	:	Ahmad Mubarak, S.Ds., M.M Ilham Fitrahriansyah Muhammad Mahfud
Penerbit (<i>Publisher</i>)	:	Lembaga Kajian Hukum (LKH) Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Alamat (*Address*) Redaksi:

REDAKSI JURNAL ILMIAH HUKUM DE'JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM

J I H ~ DE'JURE ~ K I H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Karawang

Telp. (0267) 640759; Faks. (0267) 640759

Website: www.fh.unsika.ac.id

Email: dejure@unsika.ac.id

Jurnal ini dapat diunduh pada menu e-jurnal pada laman <http://journal.unsika.ac.id/>



**JURNAL ILMIAH HUKUM
DE'JURE
KAJIAN ILMIAH HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**

Volume 3 Nomor 1

ISSN: 2541-1594

Mei 2018

J I H ~ DE'JURE merupakan Jurnal Ilmiah Hukum yang memuat naskah di bidang ilmu hukum serta analisis dan peran serta akademisi, praktisi dan masyarakat dalam merepresentasikan kebebasan berpendapat dan pembahasan soal isu-isu di bidang hukum.

J I H ~ DE'JURE merupakan media publikasi ilmiah yang terbit sebanyak dua nomor dalam satu tahun (Mei dan September).

**Setiap substansi Jurnal dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
(Citation is permitted with acknowledgement of the source)**

**Segala pendapat yang dimuat dalam Jurnal
ini tidak mewakili pendapat resmi dari
Fakultas Hukum Universitas
Singaperbangsa Karawang**



J I H ~ DE'JURE ~ K I H Redaksi

Sidang Pembaca yang dirahmati Tuhan yang Maha Esa

Jurnal Ilmiah Hukum “De’Jure” merupakan Jurnal Ilmu Hukum yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian serta kajian gagasan konseptual di bidang ilmu hukum terhadap isu-isu hukum, konseptual dalam tataran teori dan praktik, putusan pengadilan, analisis kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah serta analisis hal-hal lainnya di bidang ilmu hukum yang tidak dapat terlepas sebagai ilmu pengetahuan. Jurnal Ilmiah Hukum “De’Jure” merupakan hasil penelitian berupa tulisan baik dari kalangan civitas akademika Universitas Singaperbangsa Karawang pada umumnya maupun hasil sumbangsi Tenaga Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang serta peran aktif dari penulis-penulis lain di luar Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa/i, masyarakat, para pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM serta pemerhati ilmu hukum.

Jurnal Ilmiah Hukum “De’Jure” telah memiliki *International Standard Serial Number-ISSN* (Nomor Seri Standar Internasional) sebagai sebuah nomor khusus yang sering digunakan untuk mengidentifikasi setiap publikasi berkala dan diberikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0005.115/JL.3.2/SK.ISSN/2015.03. Volume ini diyakini dapat memberikan sentuhan dan warna baru di dalam perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Indonesia. Harapan Tim Redaksi yaitu dapat memberikan sumbangsi pemikiran/gagasan pada pembaharuan Hukum Indonesia dan setidaknya memberikan secerca sinar terang dalam hutan belantara nan gelap sebagai ungkapan terhadap pengaturan dan penerapan Hukum Indonesia dengan keyakinan Indonesia akan menjadi lebih bermartabat berdasarkan Pancasila.

Terdapat sekitar sepuluh (10) naskah yang mengkaji dan menganalisis tentang dinamika ilmu hukum dan penerapannya yang diawali oleh Andi Steven Liono yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Lelang Hak Tanggungan” Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu yang bermaksud menguraikan/menggambarkan analisis pengaturan yang ada. Hasil penelitian ini menegaskan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan hukum bagi pembeli lelang untuk melakukan permohonan peralihan hak atas tanah yang dibeli walaupun sedang terdapat sengketa tetapi juga peraturan ini dianggap menderogasi sebagian hak dari pembeli lelang.

Kedua, terdapat tulisan dari Anwar Hidayat dan Irma Garwan yang berjudul “Kajian Hukum Kritis: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Landasan Filosofis” di mana artikel ini dikhususkan pada kajian kritis terhadap hukum perdata yang telah berlaku di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka seharusnya yang dijadikan dasar pemikirannya ialah falsafah Pancasila. Hasil pembahasan sebagaimana diketahui bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala

sumber hukum negara Indonesia. Hal yang demikian ini harus sesuai dengan falsafah Pancasila adalah merupakan jiwa perjuangan dari para pejuang bangsa, sebagai alat pemersatu, dari yang sebelumnya terkotak-kotak oleh suatu daerah/wilayah, ras, suku, golongan dan agama. Ketiga, tulisan dari Deddi Diliyanto, Zainal Asikin dan Amiruddin ikut serta dalam memberikan kontribusi melalui tulisan yang berjudul "Perluasan Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014". Tulisan tersebut menekankan bahwa Bertumpu pada kategori isu hukum adalah norma kabur, maka instrumen analisis yang digunakan adalah penafsiran hukum historis. Hasil dari penelitian ini adalah wewenang praperadilan diperluas hingga berwenang memeriksa dan memutus tentang: 1). Sah tidaknya penetapan tersangka; 2). Sah tidaknya penggeledahan; dan 3). Sah tidaknya penyitaan. Kemudian dalam praktek peradilan, wewenang praperadilan diperluas lagi sampai dengan tidak berwenangnya penyidik dalam melakukan penyidikan baik terhadap tersangka (subyek hukum). Keempat, Deny Guntara, Irma Garwan dan Muhammad Gary Gagarin Akbar yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Kebijakan Nasional" di mana guru memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki peran penting, sehingga kewibawaan guru harus dikembalikan sebagaimana mestinya dan harus dapat melindungi guru sebagai seorang pendidik. Di dalam regulasi yang baru nantinya harus tercantum mengenai peran pemerintah dalam memberikan bantuan hukum kepada pemerintah, batasan-batasan sejauhmana guru dapat memberikan sanksi, adanya hak imunitas bagi guru yang memberikan sanksi kepada anak/peserta didik, mengatur ketentuan yang ada diselaraskan dengan Undang-undang tentang Perlindungan Anak dan lainnya yang dapat menunjang pemberian perlindungan hukum kepada guru.

Kelima, Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Deny Guntara yang berjudul "Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah ke Perseroan Daerah: Perusahaan Daerah Air Minum Karawang" yang menegaskan bahwa perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang merupakan amanat Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan bahwa paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkan maka harus menyesuaikan ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Selain itu, perubahan bentuk badan hukum yang dipilih yaitu Perseroda karena nantinya PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dapat dikelola secara profesional dengan tetap mengedepannya fungsi sosialnya terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Keenam, Irma Garwan, Abdul Kholid dan Muhammad Gary Gagarin Akbar dengan tulisan yang berjudul "Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang" memberikan pendapat bahwa beberapa penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Karawang menunjukkan dari tiga (3) penyebab yang paling tinggi adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus; meninggalkan salah satu pihak; tidak ada keharmonisan dan faktor ekonomi. Sedangkan dampak yang akan timbul dari perceraian diantaranya terjadinya perasaan traumatik, masalah pengasuhan anak, gangguan emosional dan perubahan status dan peran. Ketujuh, Mexsasai Indra dan Oksep Adhayanto yang

berjudul “Politik Hukum: Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” memberikan pandangan bahwa bahwa sekiranya keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mesti harus ada konsensus yang harus dilakukan sebelum MPR melangkah pada proses perubahan UUD NRI Tahun 1945.

Kedelapan, Rohendra Fathammubina dan Rani Apriani memberikan kontribusi tulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja” dengan menganalisis dalam pelaksanaan seharusnya ada sanksi yang lebih tegas terhadap setiap pelanggaran praktik ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pihak pengusaha, agar tidak terjadi lagi PHK sepihak yang merugikan pihak pekerja dan pegawai pengawas ketenagakerjaan dari Pemerintahan Daerah harus lebih intensif melakukan pengawasan ketenagakerjaan terhadap kasus PHK secara sepihak. Kesembilan yaitu Stephanus Pelor dan Ina Heliany yang memberikan kontribusi melalui tulisan yang berjudul “Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Pembangunan Politik dan Demokrasi di Indonesia” menegaskan bahwa distorsi peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia terjadi karena beberapa faktor yaitu: Adanya motif mencari keuntungan, ketiadaan sumber dana dan rendahnya profesionalisme, latar belakang profesi aktivis yang beraneka ragam, konsep ideologi yang tidak jelas serta regulasi yang terlalu longgar. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mengembalikan kembali peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pilar *civil society* yang dapat dilakukan melalui reposisi internal dan eksternal. Tulisan kesepuluh ada tulisan dari Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan yang berjudul “Kompetensi dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum di Indonesia” metode penulisan ini dalam penulisan ini dengan menggunakan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal*) atau normatif, yang mengkaji hukum sebagai norma. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa didasarkan kompetensinya, kegiatan dokter untuk menolong erat kaitannya dengan otonomi moralnya, yaitu hak dan kebebasannya sebagai pengembangan profesi mulia; dan didasarkan kewenangannya, tugas dokter erat kaitannya dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukumnya sebagai tenaga kesehatan profesional.

Tim Redaksi menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang merupakan kelemahan tersendiri baik dari segi desain cetak, substansi dan hal-hal lainnya. Untuk itu Tim Redaksi memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Demi penyempurnaan pada edisi-edisi selanjutnya, tim berharap dengan segala hormat, menerima saran dan pendapat serta kritikan dari para pembaca yang budiman.

Akhir kata Tim Redaksi berharap semoga kehadiran Jurnal edisi ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan para Pembaca mengenai dinamika pengaturan dan penerapan hukum di Indonesia dan juga bermanfaat dalam upaya membangun budaya sadar hukum. Semoga penjelasan pada setiap kalimat dan halaman dapat bermanfaat serta wujud pengembangan diri para penulis untuk mengimplementasikan Tri Dharma

Perguruan Tinggi dan mewarnai ide dan saran membangun Hukum Indonesia. Dalam kesempatan ini Tim Redaksi memberikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Civitas Akademika Universitas Singaperbangsa Karawang, Para Penulis, Para Mitra Bestari yang sudah meluangkan waktunya dalam kesibukannya yang padat. Semoga Tuhan selalu merahmati Alam Semesta ini beserta isinya.

Selamat membaca!

Tim Redaksi
Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi JIH ~ De'Jure ~ KIH	iv-vii
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI LELANG HAK TANGGUNGAN	
<i>Andi Steven Liono</i>	1-16
KAJIAN HUKUM KRITIS: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM LANDASAN FILOSOFIS	
<i>Anwar Hidayat dan Irma Garwan</i>	17-27
PERLUASAN WEWENANG PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21-PUU-XII-2014	
<i>Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, dan Amiruddin</i>	28-55
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU DALAM KEBIJAKAN NASIONAL	
<i>Deny Guntara, Irma Garwan, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar</i>	56-67
PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH KE PERSEROAN DAERAH: PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KARAWANG	
<i>Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Deny Guntara</i>	68-78
TINGKAT PERCERAIAN DAN PENGARUH FAKTOR EKONOMI DI KABUPATEN KARAWANG	
<i>Irma Garwan, Abdul Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar</i>	79-93
POLITIK HUKUM: REFORMULASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	
<i>Mexsasai Indra dan Oksep Adhayanto</i>	94-107
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK BAGI PEKERJA	
<i>Rohendra Fathammubina dan Rani Apriani</i>	108-130
PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK DAN DEMOKRASI DI INDONESIA	
<i>Stephanus Pelor dan Ina Heliany</i>	131-146
KOMPETENSI DAN KEWENANGAN PRAKTIK KEDOKTERAN: PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA	
<i>Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan</i>	147-166
Biodata Penulis	167-168
Pedoman Penulisan	169-176
Formulir Berlangganan	177



JIH ~ DE'JURE ~ KIH
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
menyampaikan terima kasih

Kepada Para
Mitra Bestari/Penilai (*referee*)
Volume 3 Nomor 1 Mei 2018

Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H.

Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H.

Dr. Abdul Atsar, S.H., S.Pd., M.H.

Dr. Bambang Daru, S.H., M.H.

Dr. Hernadi, S.H., LL.M.